



Menghindari Golput: Mengapa Satu Suara Sangat Berarti

Derla Syafira¹, Ita Purnamasari Laia²

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: derlasyafira9@gmail.com¹, itapurnamasariiii3ya@gmail.com²

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

The high rate of abstentions in the 2024 national elections has become a key issue in the dynamics of Indonesian democracy. Data from the Indonesian General Elections Commission (KPU RI) shows that (18,22%) of voters abstained from voting in the national elections, indicating a decline in public participation. This study aims to analyze the main factors causing abstentions in the 2024 elections using secondary data from survey institutions, scientific articles, and media reports. The analysis shows that abstentions are influenced by several factors, including distrust of political institutions, apathy, a lack of political understanding among various segments of society, and geographic conditions. This phenomenon has serious implications for the legitimacy of elected leaders and the quality of the country's democracy. This study emphasizes the importance of political education, election administration, and efforts to increase public participation in elections

Keywords: Abstain from Voting, Sovereignty, Election

ABSTRAK

Fenomena tingginya angka golput dalam pemilu nasional 2024 menjadi salah satu isu dalam dinamika demokrasi Indonesia. Dari hasil data KPU RI tercatat (18,22%) angka golput dalam pemilu nasional, angka tersebut menunjukkan adanya penurunan partisipasi dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor utama yang menyebabkan golput pada pemilu 2024 dengan menggunakan data sekunder dari lembaga survei, artikel ilmiah, dan laporan media. Hasil analisis menunjukkan bahwa golput dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ketidakpercayaan terhadap institusi politik, sikap apatisme, minimnya pemahaman terkait politik di berbagai kalangan masyarakat, dan faktor kondisi geografis. Fenomena ini memiliki implikasi serius terhadap legitimasi pemimpin terpilih dan kualitas demokrasi negara. Kajian ini menegaskan pentingnya edukasi politik, penyelenggaraan pemilu, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Kata Kunci: Golput, Kedaulatan, Pemilu

PENDAHULUAN

Pemilu adalah kegiatan politik yang berkaitan dengan pemilihan pemimpin untuk masa yang akan datang. Dalam negara demokrasi pemilu merupakan sarana untuk memilih pemimpin, dengan hasil dari pemilu tersebut akan ditunjuk seorang pemimpin yang nantinya akan menjadi wakil untuk menyampaikan segala aspirasi rakyatnya.

Pasal 22E UUD 1945 (Amandemen) mengatur tentang, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil presiden dan DPRD. Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik. Peserta pemilu untuk memilih anggota DPRD adalah perseorangan. Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilu diatur dengan Undang-Undang (kulonprogo.kpu.go.id)

Data KPU menyebutkan dalam pemilu nasional terakhir menunjukkan penurunan jumlah partisipasi pemilu. Pada pemilu nasional, yaitu pemilu 2019 (81,97%), pemilu 2024 (81,78%), meskipun perbedaannya sangat tipis hal tersebut tetap menjadi tanggung jawab bersama dalam mewujudkan kesuksesan pemilu. Sementara tingkat golput dalam pemilu 2019 tercatat (18,3%), sebesar 34.758.112 dari 192.770.611, sedangkan golput dalam pemilu 2024 tercatat (18,22%), sebesar 39.916.862 dari 204.422.181 (KPU RI)

Seseorang yang tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilu disebut juga golput atau golongan putih. Golput dikenal sejak tahun 1971 pada masa orde baru. Banyak faktor yang menyebabkan golput terjadi, salah satunya akibat sikap apatis, rendahnya pendidikan terkait pemilu, kondisi geografis, dan tentunya akan sangat berdampak pada demokratisasi sebuah negara.

Menurut Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, terdapat empat indikator keberhasilan pelaksanaan pemilu 2024. Pertama, aman dan lancar, tidak terjadi gangguan-gangguan signifikan dan berjalan lancar, kedua, partisipasi pemilih tinggi, ketiga, tidak terjadinya konflik, terutama yang bisa memecah persatuan, kesatuan bangsa, terlebih lagi konflik kekeradan tidak boleh terjadi, keempat, hasil pemilu diterima oleh kadidat dan masyarakat, sehingga meminimalisir perselisihan (News.detik.com)

METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, metode kualitatif lebih menekankan pada pemahaman mendalam (*deep understanding*) mengenai makna, dan konteks sosial suatu fenomena, dengan masyar pengumpulan data dilakukan melalui studi puataka, journal, buku, media online, dan artikel yang terkait dengan pemilu, golput, dan KPU.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi politik dari masyarakat merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi negara demokrasi. Dari partisipasi itulah yang nanti akan membangun dan melembagakan sebuah politik. Pemilu juga merupakan salah satu sarana dalam

mencapai kedaulatan rakyat, dengan partisipasi itulah rakyat memberikan pilihannya untuk menentukan nasib pemerintahan di masa depan.

Pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam proses demokratisasi sebuah negara, hal tersebut mengikutsertakan masyarakat untuk ikut andil dalam menentukan pemimpin dan kebijakan pemerintah, untuk mencapai kedaulatan rakyat, tentunya partisipasi masyarakat harus selalu diperhatikan supaya tidak terjadinya penurunan, dan dapat mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan apabila hal tersebut terjadi. Pemilu yang merupakan salah satu sarana untuk menjalankan demokrasi tentunya tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan warganya.

Tindakan golput yang sepenuhnya tidak pernah hilang dalam pelaksanaan pemilu, menjadi masalah yang harus selalu diperhatikan dan diselesaikan agar hal tersebut dapat di cegah dan di tekan peningkatannya. Dalam pemilu yang akan datang diharapkan agar seluruh warganya dapat ikut andil dan menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya, karena hal tersebut yang menentukan masa depan bangsa lima tahun kedepan, hal lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi salah satunya dengan menerapkan sikap sadar terhadap hukum, dengan pendidikan, melakukan tindakan positif, dan mengikuti program sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Eep Saefulloh Fatah, mengklasifikasikan golput atas empat golongan. Pertama golput teknis, yakni mereka yang berhalangan hadir di tempat pemungutan suara, atau suara yang dinyatakan tidak sah. Kedua, golput teknis-politis, mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak penyelenggaraan. Ketiga, golput politis, mereka yang tak punya pilihan dari calon tersebut atau tak percaya pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. Keempat, golput ideologis, mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi dan tak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain (Hery M.N. Fathah)

Prilaku golput di indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan, baik dari sisi masyarakat, psikologis, maupun sosial. secara umum penyebab golput yaitu, ketidakpercayaan terhadap institusi politik, sebagian warga menilai sistem parlemen, partai politik, maupun masyara penyelenggaraan pemilu belum sepenuhnya kredibel dan transparan. Ketidakpercayaan ini melahirkan sikap skeptis terhadap hasil pemilu serta menurunkan motivasi untuk berpartisipasi.

Sikap apatisme dan keletihan politik, banyak pemilih merasa bahwa keterlibatan dalam proses politik tidak membawa perubahan nyata terhadap kehidupan mereka. Kejenuhan terhadap rutinitas politik juga menimbulkan sikap pasif dan apatis. Kekecewaan terhadap elite dan politisi, korupsi, janji yang tidak ditepati, rendahnya kompetensi, dan citra masyarak sebagian politisi menjadi alasan kuat bagi sebagian warga untuk menarik diri dari proses pemilu. Kendala administratif dan teknis, permasalahan seperti pemilih yang tidak terdaftar, data pemilih keliru, TPS yang jauh, kurangnya petugas, hingga surat-surat yang tidak diterima, menjadi faktor penghambat partisipasi dilapangan.

Kurangnya masyarakat politik dan informasi juga menjadi salah satu faktornya, minimnya pemahaman tentang program, visi-misi, dan rekam jejak calon

maupun partai membuat pemilih merasa “buta pilihan”, sehingga memilih untuk tidak memilih. Pengaruh media sosial dan kampanye digital, di era digital, ajakan golput sering menyebar melalui media sosial dalam bentuk meme, opini singkat, atau narasi ketidakpercayaan terhadap sistem politik, dampaknya sebagian pemilih muda cenderung mengikuti arus tanpa mempertimbangkan dampak jangka masyara terhadap demokrasi. Faktor masyarakat dan sosio-kultural, kondisi geografis, ekonomi serta kesenjangan Pendidikan antar wilayah turut berpengaruh pada partisipasi masyarakat, di daerah seperti Papua Pegunungan, tentang medan, jarak antar pemukiman, dan keterbatasan akses informasi menjadi faktor nyata yang memerlukan perhatian khusus. (papuapegunungan.kpu.go.id)

Dalam meningkatkan partisipasi pemilu dapat dilakukan oleh siapa saja mulai dari penyelenggara pemilu, calon pemimpin, dan dapat dilakukan oleh diri sendiri. Untuk memulai dari diri sendiri dapat di mulai dengan mengambil sikap peduli hukum, meningkatkan kesadaran diri akan pemilu, dan tentunya mencari informasi terkait calon pemimpin baik itu visi, misi maupun program kerjanya.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, sebagaimana yang diamanatkan dalam falsafah Undang-Undang, diharapkan mampu melahirkan tata kelola pemerintahan yang baik, berwibawa, bersih, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sejalan dengan itu, tujuan penyelenggaraan pemilu menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, M.H. mencakup empat hal utama yaitu, menjamin berlangsungnya pergantian kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai, memberikan ruang pergantian wakil rakyat di lembaga perwakilan, menegakkan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem perwakilan, serta menjamin pelaksanaan hak asasi warga negara.

Selain itu peran KPU sangatlah strategis dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi, KPU diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam menggunakan hak pilihnya. Melalui pendekatan yang tepat, setiap individu diharapkan terdorong untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Diperlukannya berbagai upaya dan peran nyata dari KPU untuk mewujudkan pemilu yang demokratis sekaligus mengurangi tingkat golongan putih (golput).

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini merupakan berbagai peran serta langkah yang dilakukan KPU dalam mewujudkan pemilu yang demokratis sekaligus menkan angka golongan putih (golput).

1. Meningkatkan netralitas, integritas dan independensi KPU, dengan penyelenggaraan pemilu yang transparan dan adil dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.
2. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, hal tersebut mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu.
3. Melakukan sosialisasi di kalangan masyarakat, dalam sosialisasi tersebut dapat dijelaskan mengenai bagaimana sistem pemilu maupun memahami sistem kampanye. Hal ini juga berdampak pada kualitas demokratisasi negara.
4. Melakukan simulasi proses pemilihan, dengan adanya simulasi ini dapat memperlancar kegiatan pemilu, masih terdapat masyarakat yang tidak

mengetahui tata cara pemilu, hal tersebut dapat menyebabkan kegiatan pemilu berjalan lambat, terutama bagi pemilih pemuda yang baru pertama kali melaksanakan pemilu. Hal ini sangat membantu dalam proses pemilu yang akan datang.

5. Menyediakan aksesibilitas ke tempat pemungutan suara, penyediaan fasilitas sangat membantu masyarakat untuk menjangkau Tempat Pemilahan Suara (TPS), penyediaan fasilitas juga membantu bagi masyarakat yang menyandang disabilitas. Dengan terpenuhinya bantuan fasilitas ini, tentunya akan memaksimalkan pemilih dalam menggunakan hak suaranya.

Partisipasi masyarakat memiliki peranan yang sangat krusial dalam proses penentuan hasil pemilihan umum. Masyarakat tidak seharusnya hanya bersikap pasif sebagai penonton dalam pesta demokrasi, tetapi juga perlu terlibat secara aktif dalam memilih dan menilai calon pemimpin. Keterlibatan ini penting agar pilihan yang diambil benar-benar mendukung kepentingan bersama serta mendorong kemajuan di tingkat daerah, provinsi hingga nasional.

SIMPULAN

Pemilu adalah kegiatan politik yang berkaitan dengan pemilihan pemimpin untuk masa yang akan datang dan dalam negara demokrasi pemilu merupakan sarana untuk memilih pemimpin yang tentu harus bertanggung jawab atas seluruh warganya. Sesuai dengan pasal 22E UUD 1945 ayat 1 yang berbunyi “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”, hal tersebut menunjukkan bahwa pemilu harus bersifat transparan, bebas dari kecurangan dan dilakukan setiap lima tahun sekali. Dinamika pemilu tahun 2024 menunjukkan adanya tantangan bagi kualitas demokrasi, terutama terkait angka partisipasi masyarakat dalam pemilu nasional, yang awalnya pada 2019 tercatat (81,97%) dan pada 2024 tercatat (81,78%), hal tersebut menunjukkan adanya penurunan partisipasi oleh pemilih dalam pemilu. Beberapa faktor utama penyebab golput, antara lain, ketidakpercayaan terhadap institusi politik, sikap apatisisme dan keletihan politik, minimnya informasi terkait program, visi-misi calon pemimpin, dan faktor kondisi geografis, masih terdapat daerah-daerah yang sulit terjangkau, seperti papua pegunungan, dengan adanya jarak dan medan yang harus dilewati menjadi salah satu faktor penyebab golput.

Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh KPU antara lain dengan, meningkatkan netralitas, integritas dan independensi KPU, memberikan pendidikan politik, melakukan sosialisasi, melakukan simulasi proses pemilihan, dan menyediakan aksesibilitas ke tempat pemungutan suara. Partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan kunci dalam proses demokratisasi negara, dengan melibatkan warga negara secara langsung dalam menentukan pemimpin dan kebijakan pemerintah dapat meningkatkan kualitas demokrasi negara. Keikutsertaan masyarakat dalam pemilu sangatlah penting untuk menentukan pemimpin, masyarakat tidak hanya menonton melainkan ikut andil dan berperan aktif penentuan calon pemimpin, di mana hal tersebut bertujuan untuk kemajuan dan kepentingan bersama.

DAFTAR RUJUKAN

- Asmarani, S. D., Putri, V. M., Jayanti, D. W. (2024). Analisis Perilaku Golput Dikalangan Masyarakat Dan Aspek Hukum Golput Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. *JURNAL ILMIAH WAHANA PENDIDIKAN*. 10(11), 812-823. Dari <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/6988>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Jumlah Pemilih 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTY1IzI=/jumlah-pemilih.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Politik 2024. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/16/f81b8e7187d78d5463726e27/statistik-politik-2024.html>
- Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., Widiyasono, N. (2022). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*. *JURNAL ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN*. 8(1). <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/viewFile/4082/2190>
- Kamila, D. C., Sari, A. D., Kamajaya, A. P., Widiyanto, G. Y., Octaviana, Arvi., Pamekas, U., Hadji, K. (2024). Pentingnya Hak Pemilihan Umum dalam Proses Demokratisasi. *Jurnal Ilmiah Hukum Sosial dan Humaniora*. 1(3), 51-56. Dari <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Humif/article/view/265>
- KPU Kota Tangerang. (2026). Pengertian Pemilu. <https://kota-tangerang.kpu.go.id/page/read/pengertian-pemilu>
- KPU Papua Pegunungan. (2025, 08 Oktober). Sejarah Golput di Indonesia: Asal Usul, Penyebab, dan Dampaknya terhadap Demokrasi. https://papuapegunungan.kpu.go.id/blog/read/701_sejarah-golput-di-indonesia-asal-usul-penyebab-dan-dampaknya-terhadap-demokrasi
- Mulia Budi, Newsdetik.com. (2023, 13 Maret). Mendagri Ungkap 4 Indikator Pemilu Sukses Pemilih Tinggi-Tak Ada Konflik. <https://news.detik.com/pemilu/d-6616720/mendagri-ungkap-4-indikator-pemilu-sukses-pemilih-tinggi-tak-ada-konflik>
- Panjaitan, M., Rajagukguk, J., Damanik, G. Y., Aruan, E., Gulo, R. S. (2022). Golput Dan Pemilu 2024. *Jurnal Ilmiah Sosial Dan Politik*. 2(2), 82-89. Dari <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/sosialpolitik/article/view/1154>
- Rahmad, N. (2023). Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2023*. Dari <https://proceedings.ums.ac.id/pdih/article/view/3340>
- Reni, A., Darni., Hasimin. (2022). Sosialisasi Pentingnya Pemilih Pemula. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 3(1), 1-8. Dari <https://journal.um-surabaya.ac.id/HMN/article/view/12302>
- Rinaldo Farera. (2025, 13 Agustus). Bayar Pajak Tapi Tidak Menggunakan Hak Suara. KPU Sekadu. <https://kab-sekadau.kpu.go.id/blog/read/bayar-pajak-tapi-tidak-menggunakan-hak-suara>
- S, G. N., Faridah, H., Masrifah., Pratama D.E. (2024). Tanggung Jawab Pidana Terhadap Seseorang Yang Mengajak Orang Lain Untuk Golput Dalam

Pemilu. KRTHA BHAYANGKARA. 18(2), 328-342. Dari <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/755>
UUD 1945. DASAR HUKUM 1. Pasal 22E UUD 1945 (Amandemen). KPU Kulon Progo. https://kab-kulonprogo.kpu.go.id/public/kab-kulonprogo/dmdocument/1747992948_0a52cf0e096040ecc7ff.pdf